
PENGEMBANGAN DESAIN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PRA JABATAN PADA JURUSAN ILMU PENDIDIKAN SOSIAL (IPS)

Iwan Purwanto, Dwiki Darmawan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
E-mail: iwan.purwanto@uinjkt.ac.id

Abstract. *This study aims to provide policy direction on how to develop PPG Pre-service programs for Social Sciences Teachers at the Department of Social Sciences Education. The design of the Pre-service PPG program for Social Sciences teachers, it is expected that the Social Sciences Education Department can propose to the government to be appointed and appropriate and be able to organize the Pre-service PPG Programs for Social Sciences Teachers. The method used in this research is the research and development (R&D) method, the process used to develop and validate educational products. The policy analysis, comparative studies, and then developing the Pre-service PPG program design for Social Sciences Teachers. After a rough development, consultations with education experts and PPG Pre-service implementers so that the PPG Regular Pre-Position governance is better organized. The next stage is the validation test d education experts, PPG Pre-service managers. The next stage is the revision stage of the design of the Regular Pre-service PPG program for Social Sciences Teachers, then the final stage is the documentation of the proposed Pre-service PPG programs for Social Sciences Teachers at the Department of Social Sciences Education. Development of the opening design of the PPG Pre-service IPS Study Program teacher at the Social Sciences Department of FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, in general has had a good preparedness, this is based on the provisions governing the opening of PPG Regular Pre-service Study Programs, including: (1) readiness to organize the PPG Study Program Regular Pre-service Study Program, namely institutions, human resources and facilities and infrastructure; (2) curriculum and learning system, namely determining the profile of PPG graduates in the field of study, formulation of CPL in the fields of PPG study, curriculum structure, learning systems and assessments in PPG study programs ;; (3) the financing system, and (4) quality assurance. Based on the above provisions the Department of Social Sciences Education in general can prepare themselves, only constrained student dormitories are still under construction and the most important thing is to prepare yourself to become a regular PPG Pre-service organizer in a religious ministry environment, while still providing opportunities for the LPTK to include characteristics that become its superiority.*

Keywords: *Development of Teacher Professional Education Design; Department of Social Education*

Abstrak. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan arah kebijakan bagaimana pengembangan desain program PPG Pra Jabatan untuk Guru IPS pada Jurusan Pendidikan IPS. Desain program PPG Pra Jabatan untuk Guru IPS diharapkan Jurusan Pendidikan IPS bisa mengusulkan kepada pemerintah untuk ditunjuk dan layak serta mampu menyelenggarakan Program PPG Pra Jabatan untuk Guru IPS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan (R&D) yaitu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan mevalidasi produk pendidikan. Analisis kebijakan, studi banding, kemudian dilakukan pengembangan desain program PPG Pra Jabatan untuk Guru IPS. Setelah dilakukan pengembangan kasar, dikonsultasikan dengan pakar pendidikan dan para pelaksana PPG Pra Jabatan sehingga tatakelola PPG Pra Jabatan Reguler lebih tertata dengan baik. Tahap selanjutnya adalah uji validasi d pakar pendidikan, pengelola PPG Pra Jabatan. Tahap selanjutnya adalah tahap revisi desain program PPG Pra Jabatan Reguler untuk Guru IPS, kemudian tahap akhir adalah tahap pendokumentasian usulan program PPG Pra Jabatan untuk Guru IPS pada Jurusan Pendidikan IPS. Pengembangan desain pembukaan Program Studi PPG Prajabatan guru IPS pada Jurusan Pendidikan IPS FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, secara umum telah memiliki kesiapan yang baik hal ini didasarkan, pada ketentuan yang mengatur pembukaan Prodi PPG Prajabatan reguler antara lain: (1) kesiapan penyelenggaraan Program Studi PPG Program Studi Prajabatan Reguler, yaitu kelembagaan, SDM dan sarana dan prasarana; (2) kurikulum dan sistem pembelajaran, yaitu penetapan profil lulusan bidang studi PPG, perumusan CPL bidang studi PPG, struktur kurikulum, sistem pembelajaran dan penilaian dalam program studi PPG; (3) sistem pembiayaan; dan (4) penjaminan mutu. Berdasarkan ketentuan diatas Jurusan Pendidikan IPS secara umum bisa mempersiapkan diri, hanya terkendala asrama mahasiswa yang masih dalam tahap pembangunan. Dengan demikian yang terpenting adalah mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara PPG Prajabatan reguler di lingkungan kemetreirian agama, dengan tetap memberikan kesempatan kepada LPTK memasukan ciri khas yang menjadi keunggulannya.

Kata Kunci: *Pengembangan Desain Pendidikan Profesi Guru; Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial*

Permalink/DOI: <https://doi.org/10.15408/mimbar.v36i2.14181>

Pendahuluan

Berdasarkan UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pasal 2 ayat (1) bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Lebih lanjut seorang guru juga harus memiliki berbagai kualifikasi yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat, selanjutnya kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah (UU Nomor 14 Tahun 2005).

Program pengadaan tenaga kependidikan dimaksud adalah program pendidikan profesi. Pendidikan profesi yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2009 dan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra-Jabatan dan Dalam Jabatan. Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009). Sedangkan Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik (Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010).

Pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2009 yang berhak melaksanakan program PPG Pra Jabatan adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang memenuhi syarat dan diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan. Sedangkan pada Program PPG Dalam Jabatan adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program PPG pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Baik pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2009 maupun Permendikbud Nomor 9 Tahun 2010 mengisyaratkan bahwa yang menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Guru adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga merupakan LPTK yang menghasilkan calon tenaga

pendidik di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Jika mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen jelas disebutkan bahwa seorang guru bisa mengajar jika telah memiliki sertifikat pendidik, artinya LPTK sebagai penyelenggara program pendidikan pada jenjang S1 baru menghasilkan calon guru/pendidik bukan sebagai guru seperti halnya sebelumnya. UU Nomor 14 Tahun 2005 juga mengisyaratkan bahwa masa transisinya adalah selama 10 tahun artinya sejak tahun 2015 seluruh guru atau yang dinyatakan sebagai guru harus memiliki sertifikat guru. Jika seorang guru tidak memiliki sertifikat maka hal ini menyalahi UU, tentunya memiliki konsekuensi hukum jika melanggar.

Jika mengacu pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 007/B1/SK/2016 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan meliputi 23 universitas Negeri dan Swasta yang berada dilingkungan Kementerian Ristekdikti, dan belum ada LPTK di bawah Kementerian Agama. Hal ini tentunya memprihatinkan padahal LPTK di Kementerian Agama banyak, seperti halnya di FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki 11 Jurusan/Program Studi yang menghasilkan lulusan calon guru, apalagi kalau kita membagi lagi LPTK Negeri dan Swasta--nya, sangat banyak. Menurut hemat saya ini adalah menjadi tantangan tersendiri yang harus dijawab dalam tindakan nyata dan mempersiapkan diri dengan memenuhi syarat--syarat yang ditentukan. Sedangkan Program PPG Bersubsidi untuk PPG Umum dan SMK Kolaboratif meliputi : Teknik Otomotif, Agribisnis Produksi Tanaman, Teknik Mesin, Teknik Elektro/Ketenagalistrikan, Kepariwisata Pariwisata, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan, Agribisnis Produk Ternak, Teknologi Penangkapan Ikan, Teknik Kimia. Dari 23 LPTK dan Program PPG Bersubsidi Ristekdikti belum ada yang menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Guru untuk Guru IPS. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena Jurusan Pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki peluang yang sama sebagai bagian dari LPTK yang diharapkan memenuhi syarat dan ditetapkan pemerintah sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan khususnya Guru IPS.

Adapun dasar penetapan perguruan tinggi yang berhak menyelenggarakan PPG adalah di dasarkan pada penilaian yang mencakup Akreditasi, Rasio Dosen dan Mahasiswa, Pelaporan PD Dikti, Kecukupan Dosen yang relevan, Kecukupan Sarana, Kecukupan Ruang Micro Teaching, Ketersediaan Asrama, SOTK PPG, Ketersediaan Sekolah Mitra, Komitmen Mutu pada LPTK (Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009). Kalau mengacu pada standar diatas Jurusan Pendidikan IPS adalah salah satu Jurusan/Program Studi yang telah terakreditasi A oleh BAN--PT sejak tahun 2014, rasio dosen dengan mahasiswa sudah mencukupi, dan lainnya sudah mencukupi, yang belum ada adalah ketersediaan asrama yang dirasakan harus segera mempersiapkan diri membuat usulan rinci dalam yang terdokumentasikan dengan baik, karena LPTK penyelenggara PPG Pra Jabatan tidak ditetapkan begitu saja oleh pemerintah akan tetapi melalui tahapan pengusulan. Hal ini didasarkan pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan pasal 4 ayat (1) Penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG didasarkan atas hasil evaluasi dokumen usulan dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal.

Permasalahan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana dokumen usulan dan kesiapan verifikasi lapangan penyelenggaraan Program PPG Pra Jabatan pada LPTK yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah?; 2) Bagaimana pengembangan Desain Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra Jabatan Pada Jurusan Pendidikan IPS FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta?

Kajian Teori

Menurut Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Sedangkan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan yang selanjutnya disebut program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV Nonkependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013). Hal ini sama dengan yang diamanatkan oleh UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program Sarjana yang mempersiapkan peserta memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan demikian, program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan S--1 Kependidikan dan S--1/D--IV Non-- Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar mereka dapat menjadi guru profesional setelah mereka memenuhi syarat--syarat tertentu sesuai dengan standar nasional pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 9 ayat (1) bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi. Selanjutnya kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing--masing. Oleh sebab itu masing--masing penyelenggara PPG dapat mengembangkan kurikulumnya secara mandiri baik kurikulum untuk Program PPG Pra Jabatan untuk S1 kependidikan ataupun pasca S1/D--IV non-- kependidikan. Walaupun demikian LPTK tetap harus melakukan kajian yang mendalam dengan melibatkan organisasi profesi dan pengguna lulusan serta melakukan pengkajian terkait dengan kebutuhan dan latar belakang calon guru. Hal ini perlu dilakukan karena kualifikasi akademik calon peserta didik program PPG beragam.

Kualifikasi akademik yang dimaksud di atas menurut Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 adalah (1) S1 Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;; (2) S1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;; (3) S1/DIV Nonkependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;; (4) S1/DIV Nonkependidikan serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;; (5) S1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD. Selanjutnya calon peserta

program PPG yang memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e harus mengikuti dan lulus matrikulasi. Matrikulasi adalah sejumlah matakuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG. Komponen Mata Kuliah yang harus ada adalah (1) Pengayaan bidang studi (*subject enrichment*) adalah kegiatan pemantapan penguasaan materi bidang studi yang dilaksanakan secara terpadu dalam kegiatan PPG atau bisa juga merupakan mata kuliah pemantapan bidang studi; dan (2) Pedagogik khusus bidang studi (*subject specific pedagogy*) adalah mata kuliah pengemasan materi bidang studi menjadi perangkat pembelajaran yang komprehensif, mencakup: mencakup rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), bahan ajar, media pembelajaran, evaluasi, dan kerja siswa (LKS). Hal tersebut dikuatkan melalui Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 Pasal 9 menyebutkan bahwa struktur kurikulum program PPG berisi lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, latihan mengajar melalui pembelajaran mikro, pembelajaran pada teman sejawat, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL), dan program pengayaan bidang studi dan/atau pedagogi.

Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri. Menurut Permendikbud Pasal 3 persyaratan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

(a) memiliki program studi kependidikan strata satu (S1) yang sama dengan program PPG yang akan diselenggarakan; dan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan peringkat paling rendah B; dan memiliki dosen tetap paling sedikit 2 (dua) orang berkualifikasi doktor (S3) dengan jabatan akademik paling rendah Lektor, dan 4 (empat) orang berkualifikasi Magister (S2) dengan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala berlatar belakang pendidikan sama dan/atau sesuai dengan program PPG yang akan diselenggarakan, paling sedikit salah satu latar belakang strata pendidikan setiap dosen tersebut adalah bidang kependidikan; (b) memiliki sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan program PPG, termasuk asrama mahasiswa sebagai bagian integral dalam proses penyiapan guru profesional; (c) memiliki rasio antara dosen dengan mahasiswa pada masing-masing program studi sesuai SPMI; (d) memiliki program peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional atau yang sejenis dan berfungsi efektif; (e) memiliki program dan jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah mitra terakreditasi paling rendah B dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan program pengalaman lapangan (PPL); (f) memiliki laporan evaluasi diri dan penjaminan mutu berdasar fakta, paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir. Merujuk pada hasil penelitian sebelumnya tentang Pengembangan Desain PPG Pra Jabatan Pada Pendidikan IPS, peneliti belum menemukan secara spesifik meneliti pengembangan desain PPG Pra Jabatan untuk Guru IPS pada perguruan tinggi, namun ada kaitan secara tidak langsung pada Jurnal Pedagogik Pendidikan Dasar UPI, Jilid 3, Nomor 1, Januari 2015 yang ditulis oleh Babang Robandi dengan judul Model Pembelajaran Partisipatif Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Pada Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar. Namun penelitian ini lebih mengkaji tentang rendahnya kompetensi pedagogik dan profesional peserta PPG SD serta uji coba model pembelajaran partisipatif

dengan menggunakan metode quasi eksperimen. Hasil penelitian yang lebih relevan dengan penelitian ini adalah pada Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan Vol 1, Nomor 10, Oktober 2016 yang ditulis oleh *Mega Prani Ningsih, Achmad Fatchan, Singgih Susilo dengan judul Program PPG Untuk Membangun Kompetensi Guru Geografi (Studi Kasus Di Universitas Negeri Malang)*. Kajian utama pada penelitian ini adalah tentang kompetensi guru, dengan analisis utamanya mengkaji implementasi program PPG dari mulai perencanaan sampai uji kompetensi peserta PPG Geografi, dengan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Kajian penelitian yang relevan selanjutnya adalah tentang Pengembangan Disain Manajemen untuk Efektifitas Implementasi Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Daerah Perbatasan Propinsi Kalimantan Timur dan Utara yang ditulis oleh *Vandalita M.M Rambitan, Aloysius Hardoko (Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi)*. *Kajian utamanya adalah desain manajemen PPG, penelitian ini sangat sesuai dengan penelitian yang saya lakukan namun lebih pada pengembangan tatakelola atau evaluasi manajemen penyelenggaraan PPG, sedangkan penelitian yang saya lakukan memiliki kekhususan pada rancang bangun penyelenggaraan PPG Pra Jabatan untuk guru IPS.*

Metode

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (R&D). Menurut Gay (1990) penelitian pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan lembaga pendidikan, dan bukan untuk menguji teori. Sedangkan Borg and Gall (1983) mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai berikut:

Educational Research and development (R & D) is a process used to develop and validate educational products. The steps of this process are usually referred to as the R & D cycle, which consists of studying research findings pertinent to the product to be developed, developing the products based on these findings, field testing it in the setting where it will be used eventually, and revising it to correct the deficiencies found in the field-testing stage. In more rigorous programs of R&D, this cycle is repeated until the field-test data indicate that the product meets its behaviorally defined objectives.

Seperti yang diuraikan diatas metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan (R&D) yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dalam penelitian ini adalah desain Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra Jabatan Pada Jurusan Pendidikan IPS dan kemudian mevalidasi produk (desain PPG Pra Jabatan Pada Jurusan Pendidikan IPS). Menurut Borg dan Gall metode R&D terdiri 10 langkah, namun dalam penelitian ini disederhanakan menjadi 3 tahap. *Tahap pertama* yaitu tahap studi pendahuluan meliputi studi literatur termasuk studi kebijakan pemerintah, selanjutnya studi lapangan atau studi banding ke LPTK dan program studi yang sudah melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan dan tahap ini diakhiri dengan mendeskripsikan dan analisis temuan (model faktual). *Tahap kedua* yaitu tahap studi pengembangan meliputi penengembangan desain Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan, evaluasi oleh pakar pendidikan, perbaikan desain berdasarkan masukan pakar, tahap

diseminasi dengan mengundang pakar pendidikan, penyelenggara PPG Pra Jabatan, guru dan dosen IPS, kemudian *tahap ketiga* yaitu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan Desain Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan. Kemudian tahap implementasi yang tahap ini merupakan tahap penyiapan dokumen usulan lengkap Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan pada Jurusan Pendidikan IPS FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah LPTK Penyelenggara Program PPG Pra Jabatan sebanyak 23 LPTK berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 007/B1/SK/2016 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan jumlah sampling berdasarkan pencapaian tujuan dari penelitian ini, yaitu LPTK Penyelenggara PPG Pra Jabatan pada wilayah Sumatera, Jawa dan Sulawesi.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Untuk mengembangkan Desain Program PPG Pra Jabatan Pada Jurusan Pendidikan IPS dilakukan beberapa langkah atau teknik pengumpulan data dan pengembangan instrument penelitian, yaitu:

Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan datanya. Dengan wawancara terstruktur setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan peneliti mencatat serta melakukan perekaman yang kemudian hasil rekaman tersebut ditranskripsikan.

Studi Dokumentasi

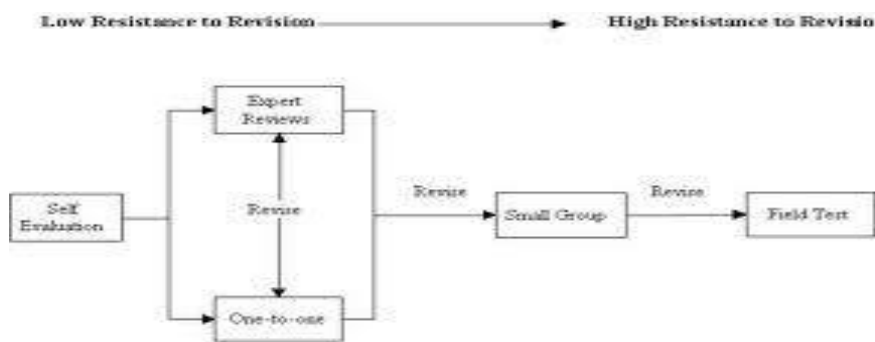
Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai cara untuk memperoleh data berdasarkan dokumen, atau buku-buku, notulen rapat/diskusi yang berkaitan dengan Pengembangan Program PPG Pra Jabatan Pada Jurusan Pendidikan IPS.

Teknik Pemeriksaan Kepercayaan (*Trustworthiness*) Studi

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan pada bentuk data yang dikumpulkan, maka uji validitas dan reliabilitas data dengan menggunakan uji keabsahan data, yaitu: (a) Uji Kredibilitas dengan Triangulasi; (b) Pengujian Trasferabiliti; (c) Pengujian Depenability; dan (d) Pengujian Komfirmability

Proses Pengembangan Desain Program PPG Pra Jabatan

Metode penelitian pengembangan tidaklah berbeda jauh dari penelitian pendekatan penelitian lainnya. Namun, pada penelitian pengembangan difokuskan pada 2 tahap yaitu tahap *preliminary* dan tahap *formative evaluation* (Tessmer, 1993) yang meliputi *self evaluation*, *prototyping* (*expert reviews* dan *one-to-one*, dan *small group*), serta *field test*. Adapun alur desain *formative evaluation* sebagai berikut :



Gambar 1. Alur Desain *formative evaluation* (Tessmer, 1993)

Hasil Yang Diharapkan

Pengembangan Desain Program PPG Pra Jabatan Pada Jurusan Pendidikan IPS bertujuan menjadikan Jurusan Pendidikan IPS sebagai penyelenggara Program PP Pra Jabatan untuk guru IPS. Program yang diusulkan dalam Pengembangan Desain Program PPG Pra Jabatan Pada Jurusan Pendidikan IPS ini mempunyai *output*, dan *outcomes* terukur yang ditunjukkan oleh indikator kinerja.

Output [inward looking]

Tersusunnya dokumen usulan Program PPG Pra Jabatan Pada Jurusan Pendidikan IPS.

Outcomes [outward looking]

Diberikannya mandat oleh pemerintah sebagai Jurusan/Program Studi Penyelenggara Program PPG Pra Jabatan untuk guru IPS, sehingga Jurusan Pendidikan IPS tidak hanya sebagai Jurusan yang menghasilkan calon guru IPS namun juga sebagai salah satu lembaga yang juga memberikan sertifikat guru khususnya untuk guru IPS.

Indikator Kinerja

Peningkatan capaian pada parameter-parameter yang berkaitan dengan *output* dan *outcome*, Secara terpadu hubungan antara *input*, proses, *output*, dan *outcome* serta indikator kinerja disajikan pada Tabel di bawah ini.

No	Aktivitas	Variabel	Indikator	Waktu	
1	I. Input Tersedianya dokumen usulan Jurusan Pendidikan IPS sebagai Penyelenggara PPG Pra Jabatan		1. Evaluasi Diri 2. Sarana dan Prasarana	Proposal dilengkapi dengan <i>roadmap</i> , dan memenuhi kriteria SMART (<i>specific, measurable, achievable, relevant, timebound</i>)	Bulan Mei 2017
2	II. Proses Penyusunan Desain Program PPG Pra Jabatan Pada Jurusan Pendidikan IPS	Desain PPG Pra Jabatan Pada Jurusan Pendidikan IPS	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2005, Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009, Permendikbud 87 Tahun 2013		Juni – September 2017
			1. Mata Kuliah Matrikulasi 2. Subject enrichment adalah mata kuliah pemantapan bidang studi 3. Subject specific pedagogy mencakup: standar kompetensi, materi, strategi, metoda, media, serta evaluasi. 4. Akreditasi 5. Kualifikasi dan rasio dosen yang relevan 6. Sarana dan prasarana 7. Program peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional atau yang sejenis dan berfungsi efektif 8. Sekolah Mitra 9. Laporan evaluasi diri		
3	III. Output Dokumen Usulan Desain PPG Pra Jabatan Pada Jurusan PIPS UIN Jakarta	Dokumen Usulan Desain PPG Pra Jabatan	Dokumen Usulan Desain PPG Pra Jabatan Pada Jurusan PIPS UIN Jakarta		Oktober 2017
4	IV. Outcome Ditetapkannya Jurusan Pendidikan IPS Sebagai Penyelenggara Program PPG Pra Jabatan untuk Guru IPS	Nilai strategis bagi pengembangan keunggulan atau <i>expertise</i> program studi	Menjadi Jurusan/Program Studi yang pertama di Kementerian Agama yang menyelenggarakan PPG Pra Jabatan untuk Guru IPS		Tahun 2018

Hasil dan Pembahasan

Pada tahap pengembangan desain Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra Jabatan dimulai dengan melakukan wawancara kepada pengelola PPG Pra Jabatan untuk meminta masukan bagaimana tahapan yang harus dipersiapkan, pelaksanaan dan evaluasi proses pelaksanaan PPG Pra Jabatan. PPG pra jabatan untuk Jurusan Pendidikan IPS pada saat peneliti lakukan pada Prodi Rumpun IPS karena belum ada yang melaksanakan kegiatan tersebut. Observasi dan wawancara peneliti lakukan adalah di Universitas Negeri Malang pada Prodi Geografi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dan tim diawali

dengan mengirim surat ke Prodi PPG Geografi dan alhamdulillah ada jawaban bisa menerima kami. Kemudian pada tanggal kami berangkat menuju Universitas Negeri Malang (UM). Kami diantar menuju Prodi PPG Geografi oleh Dosen Pendidikan IPS UM ke ruangan Ketua Prodi PPG Geografi, namun kami harus menunggu beberapa menit, karena Ketua Prodi nya masih mengajar. Namun alhamdulillah kami dipertemukan dengan Pak Hadi Purnomo Dosen Pendidikan Geografi yang juga pernah terlibat langsung menyelenggarakan PPG pada awal pelaksanaannya yang pesertanya dari SM3T. Kami bertanya kepada Pak Hadi, terkait sudah berapa lama pelaksanaan PPG Geografi di UM?

Kami sudah menyelenggara ppg 5 angkatan, tapi skemanya selang-seling seperti angkatan pertama ada, angkatan kedua tidak ada, angkatan ketiga ada, angkatan keempat tidak ada dan angkatan kelima ada, jadi bila peserta nya lebih dari 10 atau ke atas maka kita mengadakannya di universitas tersebut, bila peminatnya kurang dari itu maka pesertanya disebar ke universitas lain.

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana proses pengajuan menjadi penyelenggara PPG, menurut pak Hadi, PPG di UM sebenarnya ditunjuk oleh pemerintah, namun pertanyaan selanjutnya bagaimana kesiapan pelaksanaannya? Menurut pak Hadi sebagai berikut:

Pertama yang dilakukan oleh Universitas Negeri Malang yaitu bagaikan sambil berlari pasang sepatu, apa aja yang kita yang kita lakukan, kita siapkan perangkat, serta mempersiapkan apa aja yang di butuhkan seperti membuat sistem online, Setelah sistem itu aktif maka peserta bisa langsung mendaftar dan akun yang terdaftar bisa langsung login. Setelah itu dalam pengumpulan tugas bisa di sistem online itu.

Sedangkan menurut Pak Purwanto Kaprodi PPG sekarang menyatakan tentang pertanyaan yang sama bahwa penyelenggaraan PPG sudah dirumuskan tahun 2009, adapun kutipannya sebagai berikut:

Sebenarnya dari tahun 2009 UM sudah menyusun PPG yaitu di prodi Mipa, namun pada waktu itu peserta masih tarik ulur apakah pesertanya dari SM3T atukah Reguler.

Kemudian kami menanyakan kapan dilaksanakannya PPG Geografi di UM?

‘.....seiring berjalanya waktu pada tahun 2013, mulai di jalankanya PPG SM3T. Waktu awal kita dengan peserta 19 orang yang di drop langsung dari pusat yang pesertanya di ambil dari sekitar Malang. Peserta PPG ini bebas memilih tempat untuk melaksanakan PPG sehingga tidak mesti mahasiswa UM mendaftarkan PPG di UM, mereka bisa memilih akan mengikuti PPG dimana’

PPG SM3T yang dilaksanakan di UM, tidak diselenggarakan setiap tahun karena jumlah peserta yang kurang dari 8 mahasiswa sebagai salah satu prasyarat diselenggarakan PPG tersebut? berikut kutipannya:

iya betul karena syarat prodi bisa melaksanakan PPG yang pertama adalah peserta harus lebih dari 8 orang, jika kurang dari 8 maka kita harus rela ke tempat lain. kita baru dapet itu pada 2013 ada, 2014 kosong, 2015 ada, 2016 kosong, dan 2017 ada.

Selanjutnya bagaimana cara bisa mengikuti PPG di UM, menurut Pak Purwanto, adalah melalui tes online, kemudian tes wawancara, yang meliputi kompetensi profesional dan pedagogik, berikut kutipannya:

.....teknisnya dengan 2 ujian seleksi yaitu online dan seleksi micro teaching (untuk tes mental) dengan dua saringan itu belum tentu yang lolos tes online akan lolos micro teaching walaupun SM3T

Pelaksanaan PPG yang telah dilakukan dilakukan dengan sistem blok, yaitu workshop dan PPL hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pak Purwanto “: iya pola PPG ada 2 yaitu workshop dan PPL” Untuk materi workshop di kembangkan dari apa yang di butuhkan sekolah saat ini konten-kontennya di sesuaikan dengan ke butuhan di SMA, sedangkan pendalaman materi di lakukan di UTN yang berupa ketrampilan, penelitian, dan penguasaan materi”

Adapun terkait dengan workshop yang dilakukan UM terkait menurut responden ada 3 hal

workshop itu ada 3 hal ya pak yaitu Konten, pedagogik, ptk. Nah teknisnya itu sama setiap prodi mulai dari materi, penyusunan silabus, perangkat, presentasi perangkat, revisi, kemudian di lakukan micro teaching internal

Peneliti: itu berarti di lakukan di workshop yaa?

Pak Purwanto: iya itu di workshop. Baru setelah itu ada revisi lagi kemudian micro teaching eksternal (mendatangkan guru pamong ke tempat ppg). Micro teaching eksternal di setiap prodi berbeda, di geografi UM sendiri berbasis sekolah yaitu dengan mendatangkan guru pamong. Untuk pembagian sekolah di tetapkan dari awal, PPG geografi UM berbasis sekolah itu yaitu supaya perguruan tinggi linier dengan sekolah karena di setiap sekolah berbeda-beda sehingga mahasiswa tidak mengalami perubahan RPP dan sebagainya (termasuk 2 guru pembimbing). Nantinya guru yang di datangkan di atur oleh sekolah tersebut, setiap sekolah terdapat kordinator tersendiri

Peneliti: nati guru yang datang tersebut itu juga mendapatkan transport ya pak?

Pak Purwanto: iya betul dengan membawa SPPD dan sebagainya, itu adalah nanti di teknis keuangan, termasuk didalamnya yang di pertimbangkan seperti pangkat golongan dan sebagainya

Peneliti: Kriteria guru yang didatangkan itu guru yang tersertifikasi ya pak

Pak Purwanto: iya. Namun sering terjadi seperti ini, kelangkaan guru geografi yang ada di kota ini, membuat guru yang ingin kita pilih yang memenuhi syarat seperti sudah tersertifikasi dan minimal sudah 10 tahun, itu kan susah. Jadi kita juga terkadang harus berani mengambil resiko dengan mengambil guru baru tapi sudah tersertifikasi,

Peneliti: kalo dalam struktur kurikulumnya itu terdapat mata kuliah-- mata kuliah seperti itu tidak?

Pak Purwanto: Dalam struktur kurikulum workshop terdapat matakuliah--matakuliah yang berhubungan dengan geografi dengan 22 SKS. Matakuliah tersebut di sesuaikan dengan kebutuhan sekolah, konsep mata kuliah yang ada yaitu:

- penguatan materi
- RPP
- Presentasi RPP
- micro teaching

Peneliti: kalo UTN itu seperti apa?

Pak Purwanto: UTN dilakukan secara online dan dilakukan sesudah melakukan workshop sebagai ujian nasionalnya itu. antara workshop dengan konten ujian itu kan berbeda lagi kalau workshop

Peneliti: nah kalo ujian di dalam yang melibatkan praktik--praktik itu seperti apa?

Pak Purwanto: Ujian dari dalam yang melibatkan praktik--praktik pengajar (PPL) disebut ujian kinerja yang terkait dalam mengerjakan perangkat, praktik kemudian ada PTK. setelah itu baru dilaksanakan UTN, selain dua ujian tersebut juga ada ujian local dalam hal ini yang membuat soal adalah dari prodi sendiri dalam bentuk esai dan isinya juga tentang konten dan pemecahan masalah, berbeda dengan UTN yang di buat oleh pusat.

Peneliti: Klo UTN itu soalnya pilihan ganda ya pak, dan itu sama--sama memuat konten.

Pak Purwanto: Ujian lokal berisikan soal--soal tentang pemecahan masalah dalam bentuk soal essay. Soal UTN bobotnya 10% dari keseluruhan total penilaian yang ada namun jika UTNnya tidak lulus maka akan gagal semuanya. Jadi walaupun bobotnya 10% tapi sangat menentukan, (peserta harus menguasai konten dengan baik) mata kuliah harus mengarah konten yang kuat dengan berbasis keilmuan, saya sendiri berspekulatif melihat kondisi ini, karantina selama 1 tahun disini itu, peserta sudah jenuh dengan setiap hari workshop dengan proses yang sama, kadang--kadang saya berfikir gini "yang penting kalian melakukan kegiatan ini dengan kemampuan dan kualitas yang ada. Tapi semua itu akan sia--sia jika UTN tidak lulus makanya konten harus anda kuasai dengan baik.

Hasil wawancara yang dilakukan di UM menunjukkan gambaran yang cukup jelas, sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian terkait dengan usulan dan kesiapan verifikasi lapangan penyelenggaraan Program PPG Pra Jabatan pada LPTK yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah?.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini tidak hanya mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan PPG saja, namun lebih lanjut adalah bagaimana Jurusan Pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah juga bisa menyelenggarakan PPG Prajabatan Reguler. Berdasarkan observasi, wawancara, studi dokumen terhadap pedoman PPG yang diselenggarakan UM dan UNY, juga berdasarkan kajian terhadap aturan penyelenggaraan PPG Reguler, maka Jurusan Pendidikan berkeinginan menyelenggarakan PPG Prajabatan Reguler dengan berbagai pertimbangan antara lain:

1. Aspek pemenuhan syarat penyelenggaraan PPG Prajabatan sudah memenuhi sebagaimana tertuang Persyaratan Pembukaan Program Studi PPG "LPTK yang dapat mengusulkan Pembukaan Program Studi PPGa dalam LPTK yang memiliki: (1) Akreditasi Institusi

Perguruan Tinggi (AIPT) berkategori unggul (A) dan/atau baik sekali (B); (2) Program studi pendidikan bidang ilmu yang terakreditasi unggul (A) atau dalam kondisi khusus terakreditasi minimal baik sekali (B)” (Kemenristekdikti, 2017). Dari kedua persyaratan tersebut UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah terakreditasi A BAN--PT dan kemudian Prodi Pendidikan IPS sudah memiliki akreditasi A dengan nilai 367. Dari sisi pemenuhan dosen Program Studi PPG pada Jurusan Pendidikan IPS telah memiliki lebih dari 6 dosen dengan kepangkatan minimal Lektor dan ber--NIDN pada Prodi Pendidikan IPS. Persyaratan tersebut sesuai dengan Pedoman Pembukaan Prodi PPG di LPTK. Kemenristekdikti 2017 “ Dosen tetap paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang dengan kualifikasi: (a) Berijazah paling rendah Magister dan berjabatan fungsional minimum Lektor Kepala dengan bidang studi yang relevan dengan prodi PPG;; (b) Dosen tetap yang telah memiliki NIDN pada program studi lain wajib dilengkapi dengan surat pernyataan pindah *home base* dari pemimpin PT;; (c) Bukan PNS/aparat sipil negara dari kementerian lain” (Kemenristekdikti, 2017).

2. Program Studi Pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan LPTK dibawah Kementerian Agama yang memiliki keunikan dan keunggulan sendiri. Karena semua kegiatan akademik berkaitan langsung dengan Kemenristekdikti dan Kementerian Agama, dan lulusan pada program studi pendidikan IPS utamanya diarahkan untuk mengisi kekosongan Guru IPS pada tingkat MTs. Menurut PP Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) “Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam” (PP Nomor 19 Tahun 2017). Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa mempersiapkan kompetensi guru yang baik melalui PPG Prajabatan di lingkungan kementerian Agama, seperti halnya tertuang pada Pedoman Pembukaan Prodi PPG di LPTK. Kemenristekdikti 2017 “*Terkait dengan itu, pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan beban belajar diatur dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh LPTK dengan mengacu ke Standar Nasional Pendidikan. Namun demikian, mengingat bervariasinya mutu LPTK, diperlukan kurikulum PPG yang bersifat nasional dengan tetap **memberikan kesempatan kepada LPTK memasukkan ciri khas yang menjadi keunggulannya***”.

Oleh sebab itu Pembukaan Prodi PPG Prajabatan dilingkungan Kementerian Agama menurut peneliti merupakan hal yang penting dalam rangka mengembangkan tata kelola kelembagaan LPTK yang mampu sejajar dengan Program Studi Pendidikan IPS dilingkungan Kemenristek dikti namun masih mempertahankan ciri khas yang keagamaan karena pangsa pasar lulusan LPTK keagamaan khususnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan guru pada Madrasah, baik MI, MTs, maupun MA.

Adapun penyusunan desain Program Pelaksanaan PPG Prajabatan Pendidikan IPS yang dikembangkan antara lain : (1) menyusun Profil Lulusan dan Standar Kompetensi Lulusan. Profil

lulusan PPG Prajabatan IPS adalah menjadi guru IPS Profesional yang dideskripsikan sebagai pendidik, fasilitator pembelajaran kreatif, inovatif yang mendidik dengan penguasaan materi IPS yang baik, memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi untuk mengikuti perkembangan IPS dan pembelajarannya, berjiwa Pancasila, didukung kemampuan berbahasa Inggris, memiliki jiwa kepemimpinan, serta memiliki potensi melanjutkan ke pendidikan profesi sehingga menjadi guru profesional dan mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi baik bidang pendidikan maupun ilmu--ilmu sosial dan cabang ilmu sosial;; (2) standar kompetensi lulusan selanjutnya dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum;; (3) Struktur Kurikulum, adapun struktur kurikulum yang dikembangkan pada penelitian ini adalah dengan input S1 kependidikan sebagai berikut:

KODE WORKSHOP	MATA TATAR WORKSHOP	SKS	Semester
	Orientasi dan Pretest		
PIPS701	Pemantapan dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran dinamika Geografi Lingkungan Fisik dan Manusia, Geografi Regional Indonesia dan Geografi Regional Dunia	5	1
PIPS702	Pemantapan dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dinamika Pengantar Sosiologi--Antropologi, Sistem Sosial Budaya Indonesia dan Perubahan Sosial Budaya	5	1
PIPS703	Pemantapan dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dinamika Teori Ekonomi Mikro, Teori Ekonomi Makro dan Ekonomi Pembangunan	5	1
PIPS704	Pemantapan dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dinamika Sejarah Indonesia Lama, Sejarah Indonesia Madya dan Sejarah Indonesia Baru	5	1
PEKO715	Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Tes Formatif 1 Tes Formatif 2 Postes Kunjungan Kesekolah Orientasi Permasalahan PTK	2	1
	JUMLAH SKS SEMESTER I	22	
UPPL701	Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)	15	
UPPL702	Praktik PTK	1	
	JUMLAH SKS SEMESTER 2	16	
TOTAL SKS SEMESTER I DAN 2		38	

Workshop SSP adalah suatu pembelajaran berbentuk lokakarya yang bertujuan untuk menyiapkan peserta Program PPG agar mampu (1) menguasai materi ajar atau substansi bidang studi IPS, (2) merancang materi dan perangkat pembelajaran IPS, (3) mengidentifikasi masalah-masalah

pembelajaran IPS dan merancang alternatif perbaikannya, (4) melaksanakan pembelajaran IPS secara profesional, serta (5) mengembangkan sikap positif dalam mengelola pembelajaran IPS.

Workshop SSP dirancang untuk menyiapkan peserta dalam melakukan PPL. Peserta dinyatakan siap untuk melaksanakan tugas Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada semester II, ditandai dengan kesiapan (1) RPP, (2) bahan ajar, (3) media pembelajaran, (4) pendukung pembelajaran lainnya, (5) kemampuan menampilkan kinerja calon guru profesional, serta (6) proposal atau rencana penelitian tindakan. Oleh sebab itu dalam workshop SSP peserta diharapkan mampu menyusun PTK.

Pelaksanaan Workshop SSP

Pelaksana kegiatan adalah Prodi Pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah. Kegiatan dilakukan dalam sistem Blok. Pada semester I, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Workshop *Subject Specific Pedagogy* (SSP) yang dilakukan di Prodi Pendidikan IPS. Kegiatan pada semester II diselenggarakan dalam bentuk Program Pengalaman Lapangan (PPL) secara intensif, yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan IPS bermitra dengan sekolah mitra, di tingkat MTs/SMP.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Workshop Program PPG dilaksanakan pada Semester I. Tempat pelaksanaan di kampus Prodi Pendidikan IPS. Rincian waktu pelaksanaan diuraikan berikut ini.

KEGIATAN	KETERANGAN
Peserta datang	
Orientasi Awal PPG	Pleno 1 di Tingkat Universitas
Orientasi Awal PPG	Lanjutan Pleno 1, dan Pleno 2 di Prodi
Pelaksanaan Workshop SSP	Pleno 2, Pleno 3
Orientasi ke Sekolah/ Guru Kelas	Penentuan masalah untuk pelaksanaan PTK, (dilakukan satu hari)
Penyusunan Proposal PTK	Prodi
Review dan Kompilasi Perangkat Pembelajaran 3 Tingkat Kelas	Prodi
Remidi	Bagi yang memerlukan, dilakukan di prodi

Pelaksanaan workshop secara umum dikelola secara siklis, dengan satu siklus selama 5 hari. Hari pertama sampai hari ketiga dilakukan Pleno 2 dan Diskusi Kelompok. Setiap hari Pleno 2 dilakukan pada jam ke 1--5 sedangkan diskusi kelompok dilakukan pada jam ke 6--8. Pada hari keempat dilakukan Kerja kelompok/mandiri dan Pleno 3. Hari kelima dilakukan kegiatan *Peer Teaching* dan Persetujuan RPP.

PPL menerapkan pendekatan supervisi klinis dan tindakan reflektif dalam bentuk siklus dengan prinsip berkelanjutan, terstruktur, dan relevan dengan perangkat pembelajaran dan RPP. Supervisi klinis adalah suatu bentuk bimbingan profesional yang diberikan kepada guru/ calon guru sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan sikap yang profesional. Pelaksanaan supervisi klinis dengan prinsip--prinsip (1) hubungan kolegial dan interaktif yang intim dan terbuka;; (2) pertemuan untuk musyawarah secara demokratis;; (3) sasaran supervisi adalah kebutuhan dan aspirasi peserta;; (4) pengkajian balikan berdasarkan data observasi untuk memantapkan rencana kegiatan selanjutnya;; serta (5) mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab peserta.

Prosedur dan Kegiatan

Prosedur dan kegiatan PPL dilakukan dengan pola blok selama satu semester, yaitu pada semester II tahun akademik PPG. Pada semester I peserta menyelesaikan Workshop SSP yang menghasilkan perangkat dan RPP untuk semua materi pada semua jenjang satuan pendidikan (SMP dan SMA). Pada semester II peserta mengimplementasikan perangkat dan RPP sesuai dengan kalender akademik di sekolah mitra.

PPL dengan pola blok dilaksanakan dengan kegiatan berikut.

1. Persiapan PPL (observasi dan orientasi di sekolah mitra).
2. Praktik mengajar terbimbing.
3. Praktik mengajar mandiri.
4. Ujian praktik mengajar.

PTK dilaksanakan di sela--sela waktu praktik pembelajaran menyesuaikan dengan jadwal pembelajaran sekolah mitra. Dalam hal ini DP dan GP berperan sebagai pengamat. Teman sejawat juga diperkenankan menjadi pengamat. =

Sistem Evaluasi PPG

Pada hakekatnya program PPG merupakan pendidikan yang mempersiapkan lulusannya untuk menyelenggarakan layanan ahli kependidikan. Agar mampu menyelenggarakan layanan ahli, calon guru dituntut memiliki, menguasai dan mampu menerapkan seperangkat kompetensi, yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Adapun evaluasi yang dilakukan ddalam PPG meliputi: (1) Penilaian Penguasaan Kemampuan Akademik;; (2) Penilaian Penguasaan Kemampuan Profesional (Bidang Ilmu/Keahlian);; (3) Penilaian dalam Konteks Ujian Akhir : *yang meliputi Penilaian Kegiatan Lokakarya, Penilaian PPL, Uji Tulis LPTK (UTL) dan Uji Kompetensi Nasional (UTN).*

Penutup

Kesimpulan

Kegiatan PPG yang dilakukan LPTK pada awalnya adalah dilaksanakan setelah ada penunjukan dari kementerian pendidikan tinggi, selanjutnya baru LPTK yang ditunjuk itu melakukan persiapan secara keseluruhan. Selanjutnya terkait dengan penerimaan mahasiswa juga didasarkan dengan system kuota yang langsung diberikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah kemenristekdikti.

Tahapan pengembangan desain pembukaan Program Studi PPG Prajabatan Pendidikan IPS pada Jurusan Pendidikan IPS FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, secara umum Jurusan Pendidikan IPS telah memiliki kesiapan yang baik hal ini didasarkan, pada ketentuan yang mengatur pembukaan Prodi PPG Prajabatan regular antara lain: (1) kesiapan penyelenggaraan Program Studi PPG Program Studi Prajabatan Regular, yaitu kelembagaan, SDM dan sarana dan prasarana; (2) kurikulum dan sistem pembelajaran, yaitu penetapan profil lulusan bidang studi PPG, perumusan CPL bidang studi PPG, struktur kurikulum, sistem pembelajaran dan penilaian dalam program studi PPG; (3) sistem pembiayaan; dan (4) penjaminan mutu.

Rekomendasi

Berdasarkan ketentuan diatas Jurusan Pendidikan IPS secara umum bisa mempersiapkan diri, hanya terkendala asrama mahasiswa yang masih dalam tahap pembangunan, walaupun menurut ketentuan bahwa “Penetapan penyelenggara Program Studi PPG prajabatan regular untuk tahun pertama (Tahun 2017) dilakukan dengan penugasan. Kemenristekdikti tidak langsung menunjuk LPTK tertentu namun dengan mekanisme diantaranya “*Rektor/penanggung jawab LPTK menyampaikan usulan untuk ditetapkan sebagai perguruan tinggi penyelenggara program PPG kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Rincian usulan Program Studi PPG diatur dalam Keputusan Menristekdikti tentang Pedoman Pembukaan Program Studi PPG di LPTK beserta instrumennya*” Menurut peneliti maka yang terpenting adalah mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara PPG Prajabatan regular di lingkungan kementerian agama, karena LPTK dikementerian agama memiliki kekhasan yaitu keislaman.

Daftar Pustaka

- Ningsih, Mega Prani, Achmad Fatchan, Singgih Susilo (2016) Program PPG Untuk Membangun Kompetensi Guru Geografi (Studi Kasus Di Universitas Negeri Malang). Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan Vol 1, Nomor 10, Oktober 2016
- Panduan Penyelenggaraan Program PPG Kemenristekdikti 2017 Pedoman Pembukaan PPG Di KPTK Kemenristekdikti 2017

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra--Jabatan.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Program Pendidikan Guru Pra Jabatan
- Permendiknas Nomor 126 T ahun 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan
- Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru PraJabatan
- Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program PPG dalam Jabatan
- Robandi, Babang (2015) Model Pembelajaran Partisipatif Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Pada Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar. Jurnal Pedagogik Pendidikan Dasar UPI, Jilid 3, Nomor 1, Januari 2015. UPI